

Catatan Akhir Tahun



Daftar Isi

01. Tentang ECPAT Indonesia	4	08. Rencana Program ECPAT 2025	46
02. Ringkasan Eksekutif	7	09. ECPAT Members 2023-2024	48
03. Situasi Kekerasan dan Eksploitasi Seksual Anak (ESA) di Indonesia	9	10. Sumber Pendanaan	49
04. Program ECPAT Indonesia 2024	24	11. Mitra ECPAT Indonesia	50
05. Keberhasilan Program	39		
06. Tantangan dan Hambatan Program	42		
07. Kesimpulan dan Rekomendasi	44		

Tentang ECPAT Indonesia

ECPAT Indonesia adalah jaringan nasional yang menaungi 21 organisasi dan 2 individu di 11 provinsi, berkomitmen melawan Eksploitasi Seksual Anak (ESA) dalam berbagai bentuk, termasuk perdagangan anak, eksploitasi dalam prostitusi, pornografi, perjalanan dan pariwisata, perkawinan anak, serta eksploitasi daring.

Sebagai bagian dari ECPAT International, yang memiliki 124 mitra di lebih dari 100 negara, ECPAT Indonesia aktif dalam upaya nasional, regional, dan global untuk menghapus ESA. Melalui kolaborasi lintas sektor dengan masyarakat sipil, akademisi, pemerintah, sektor swasta, dan badan internasional, ECPAT Indonesia mendorong aksi konkret untuk melindungi anak-anak dari eksploitasi seksual.

Visi ECPAT Indonesia

Setiap anak di Indonesia bebas dan terlindungi dari segala bentuk eksploitasi seksual, serta hak-hak dasarnya terpenuhi dengan dukungan penuh dari masyarakat dan pemerintah.

Misi ECPAT Indonesia

Misi kepada Anggota

Membangun komitmen dan kerja sama yang kuat, meningkatkan kapasitas, serta memperluas jaringan dalam upaya memerangi ESA.

Misi kepada Masyarakat

Meningkatkan kesadaran, kepedulian, sikap kritis, dan partisipasi masyarakat, termasuk anak-anak dan kaum muda, dalam upaya bersama menentang ESA.

Misi kepada Pemerintah

Mendorong pemerintah untuk berkomitmen dan mengambil langkah konkret, baik secara administratif maupun hukum, dalam upaya penghapusan ESA di Indonesia.



Apa Yang Dilakukan ECPAT Indonesia

- Advokasi kepada pemerintah dan pemangku kepentingan di tingkat nasional untuk memperkuat kebijakan, regulasi, serta rencana aksi nasional dalam penghapusan ESA.
- Peningkatan kapasitas bagi anggota dan kelompok strategis melalui dukungan teknis, pelatihan, dan lokakarya terkait ESA.
- Penelitian dan pengumpulan data terkait situasi ESA melalui survei, kajian cepat, dan penelitian mendalam.
- Sosialisasi dan edukasi melalui seminar, diskusi, konferensi, serta penyebaran informasi mengenai ESA.
- Kampanye kesadaran publik melalui pengembangan materi edukatif dan media komunikasi yang inovatif.
- Pemberdayaan anak dan pemuda melalui pembentukan kelompok pemuda serta pengembangan program berbasis komunitas untuk pencegahan ESA.
- Pelayanan dan dukungan bagi korban dan penyintas ESA.



Ringkasan Eksekutif

Pada tahun 2024, ECPAT Indonesia terus berkomitmen dalam menangani dan mencegah eksploitasi seksual anak di Indonesia melalui berbagai program strategis. Berbagai inisiatif yang dijalankan memberikan wawasan mendalam terhadap kondisi eksploitasi seksual anak dari berbagai perspektif.

Tahun ini, ECPAT Indonesia menjalankan program riset, advokasi, pencegahan, peningkatan kapasitas masyarakat, serta penguatan kelompok anak dan orang muda.

Selain itu, ECPAT Indonesia juga menjalin kerja sama erat dengan pemangku kepentingan, termasuk kementerian, dinas-dinas terkait, lembaga layanan korban milik pemerintah, serta kelompok masyarakat dalam upaya pencegahan eksploitasi seksual anak.

Dalam program riset, ECPAT Indonesia melaksanakan berbagai penelitian yang menjadi dasar dalam upaya pencegahan dan penanganan eksploitasi seksual anak.

Beberapa riset utama yang dilakukan meliputi penelitian terkait penyalahgunaan penyedia jasa keuangan dalam eksploitasi seksual anak, studi strategi pencegahan eksploitasi seksual anak bersama kepolisian, pemetaan situasi pekerja anak di sektor pariwisata di Bali, serta pemetaan situasi Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan eksploitasi seksual anak di Jakarta Timur.

Dalam kerja advokasi, ECPAT Indonesia berperan aktif di tingkat nasional maupun internasional. Di tingkat nasional, advokasi yang dilakukan mencakup penyusunan kebijakan bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) terkait perlindungan anak di ranah daring, kolaborasi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam menelusuri penyalahgunaan penyedia jasa keuangan terkait eksploitasi seksual anak, serta kerjasama dengan sektor swasta seperti Digital Platform dan Swiss-Belhotel Group dalam upaya pencegahan eksploitasi seksual anak di industri online dan pariwisata. Sementara itu, di tingkat internasional, ECPAT Indonesia terlibat dalam berbagai kegiatan, termasuk menyelenggarakan Konferensi ASEAN mengenai penyalahgunaan penyedia jasa keuangan, terlibat dalam ASEAN ICT Forum

di Bali, We Protect Global Alliance Summit di Abu Dhabi, serta Asia Pacific Internet Governance Forum (APrIGF) di Taiwan.

Dalam upaya memperkuat kapasitas berbagai pemangku kepentingan, ECPAT Indonesia menyelenggarakan berbagai pelatihan, di antaranya Bimbingan Teknis pembentukan Desa Bebas Pornografi di 28 desa/kelurahan yang tersebar di Lampung Tengah, Sleman, Depok, dan Bekasi. Selain itu, ECPAT Indonesia juga memberikan pelatihan peningkatan kapasitas bagi 5 UPTD PPA di Jakarta, Kota Bandung, Kabupaten Sleman, Kota Surakarta, dan Kabupaten Sidoarjo untuk meningkatkan standar operasional prosedur dalam mendampingi korban eksploitasi seksual anak. Kerja sama dengan Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Agung juga dilakukan dalam memberikan pelatihan bagi 35 jaksa terkait tindak pidana eksploitasi dan pekerja anak.

ECPAT Indonesia juga aktif dalam mengembangkan program yang melibatkan anak dan orang muda dalam kampanye pencegahan eksploitasi seksual anak.

Beberapa program utama yang dijalankan meliputi Youth Voice for Change, bekerja sama dengan Yayasan Sejiwa yang melibatkan anak dan orang muda dalam pencegahan eksploitasi seksual anak, serta program Teman Anak yang mempromosikan internet aman bagi anak di lima kabupaten/kota (Jakarta, Bogor, Tangerang Selatan, Cianjur, dan Indramayu) dengan total peserta mencapai 2.000 orang yang terdiri dari anak, orang tua, dan guru. Selain itu, ECPAT Indonesia juga aktif dalam peringatan Hari Internet Sedunia serta Hari Anak Nasional dan Internasional.

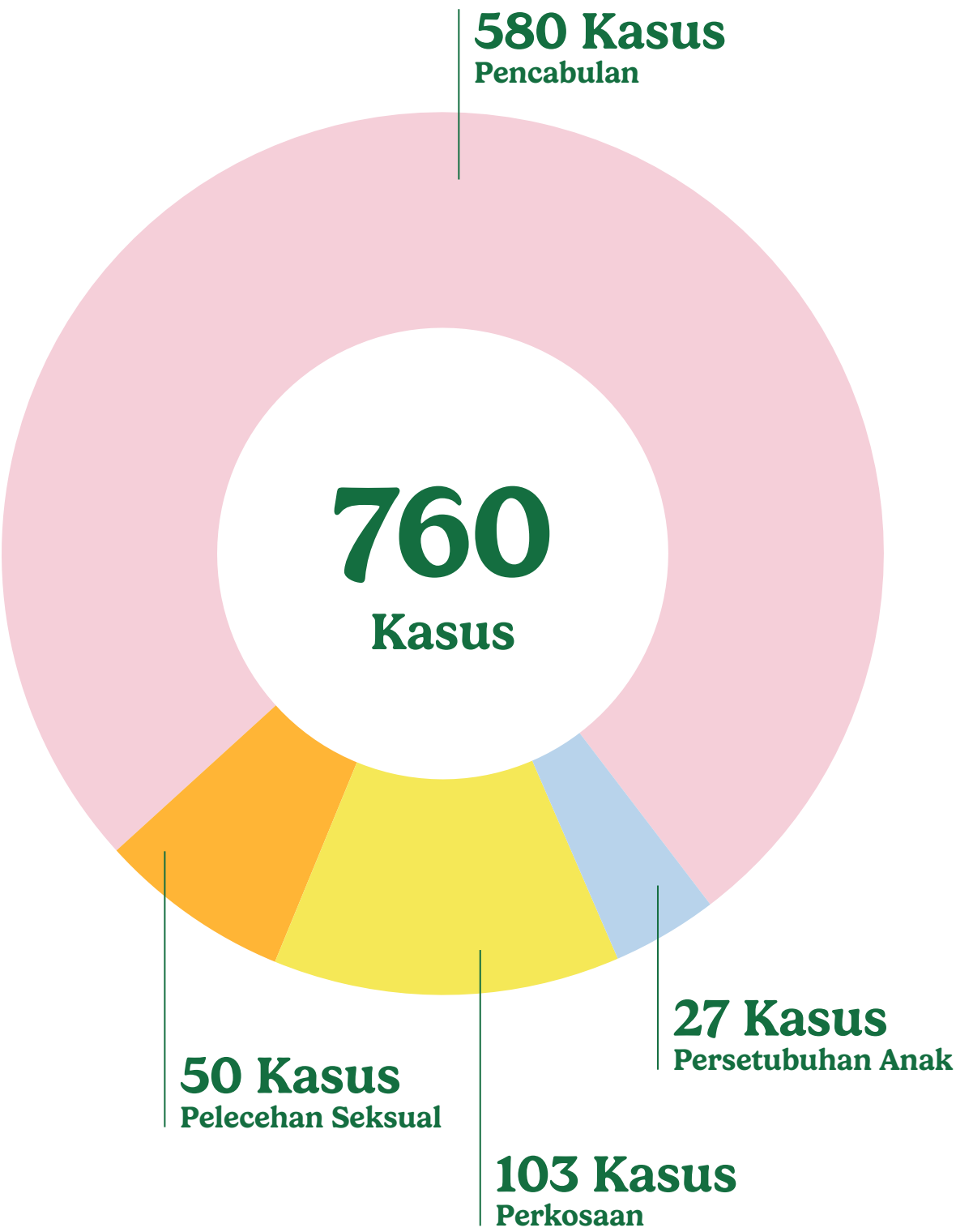
Situasi Kekerasan dan Eksploitasi Seksual Anak (ESA) di Indonesia

Pada tahun 2024, ECPAT Indonesia melakukan pemantauan media terhadap kasus-kasus eksploitasi seksual dan kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi di Indonesia.

Hasil pemantauan menunjukkan bahwa angka kekerasan dan eksploitasi seksual anak masih sangat tinggi, dengan kasus yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia.

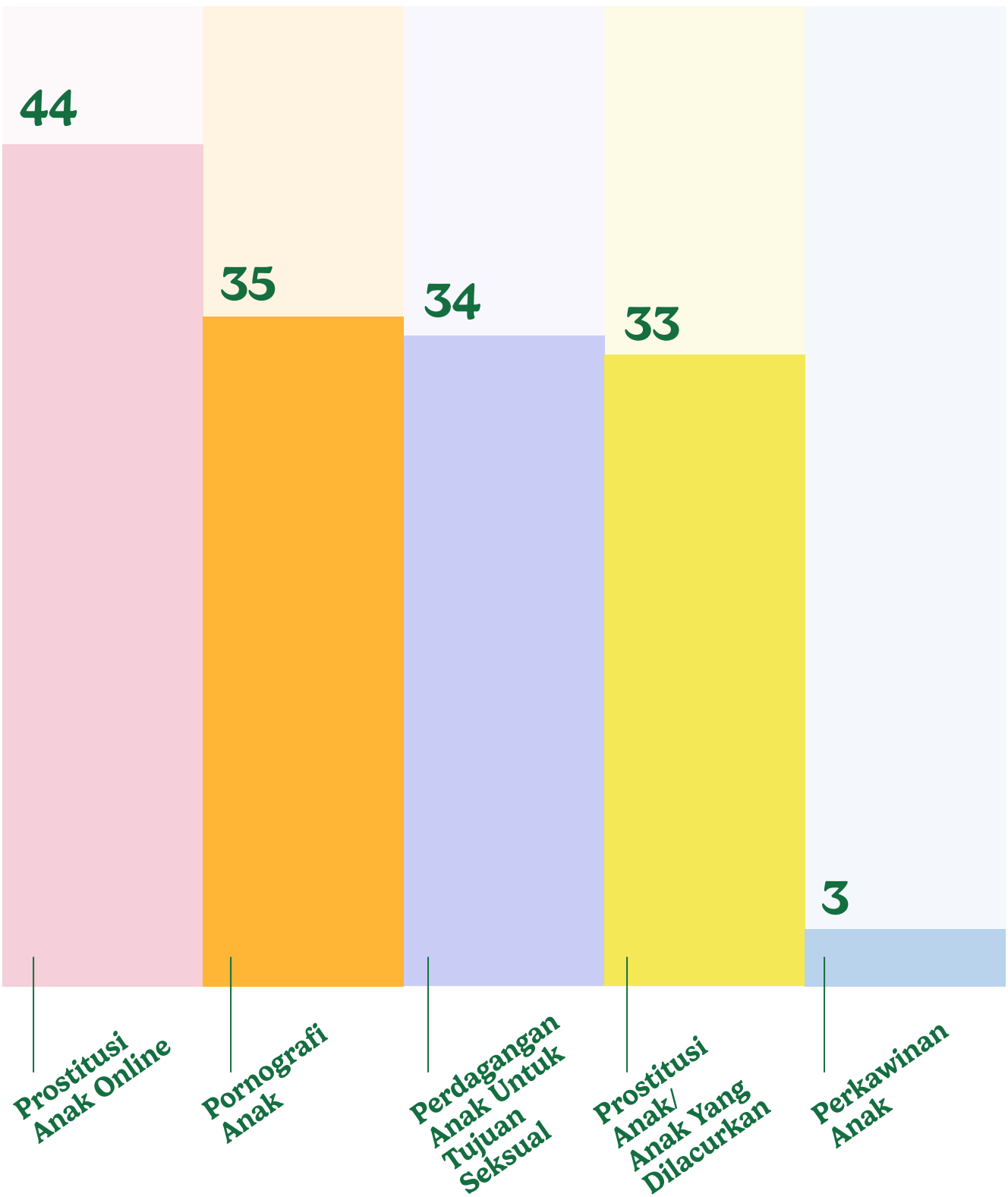
Sepanjang tahun 2024, ECPAT Indonesia mencatat 909 kasus kekerasan dan eksploitasi seksual terhadap anak. Dari jumlah tersebut, 760 kasus merupakan kekerasan seksual terhadap anak, sementara 149 kasus terkait eksploitasi seksual anak.

Jenis Kasus Kekerasan dan Eksploitasi Seksual Anak Tahun 2024

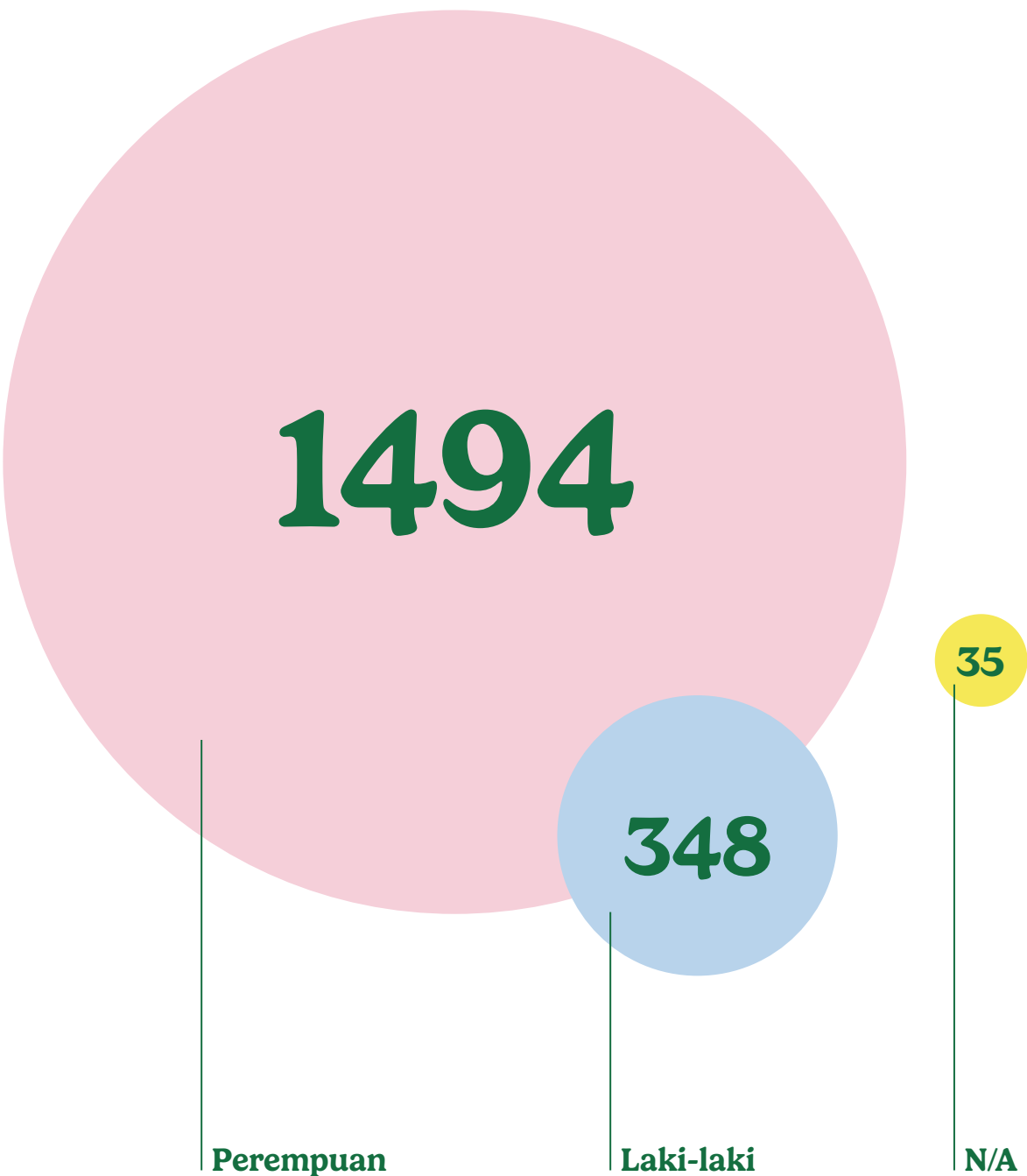


Kasus Eksploitasi Seksual Anak Tahun 2024

Terdapat total 149 kasus eksploitasi seksual anak tahun 2024 di Indonesia.



Jenis Kelamin Korban Kekerasan dan Eksploitasi Seksual Anak Tahun 2024



Sepanjang tahun 2024, tercatat 1.877 anak menjadi korban dari 909 kasus kekerasan dan eksploitasi seksual terhadap anak yang terjadi di Indonesia.

Usia Korban Kekerasan dan Eksploitasi Seksual Anak Tahun 2024

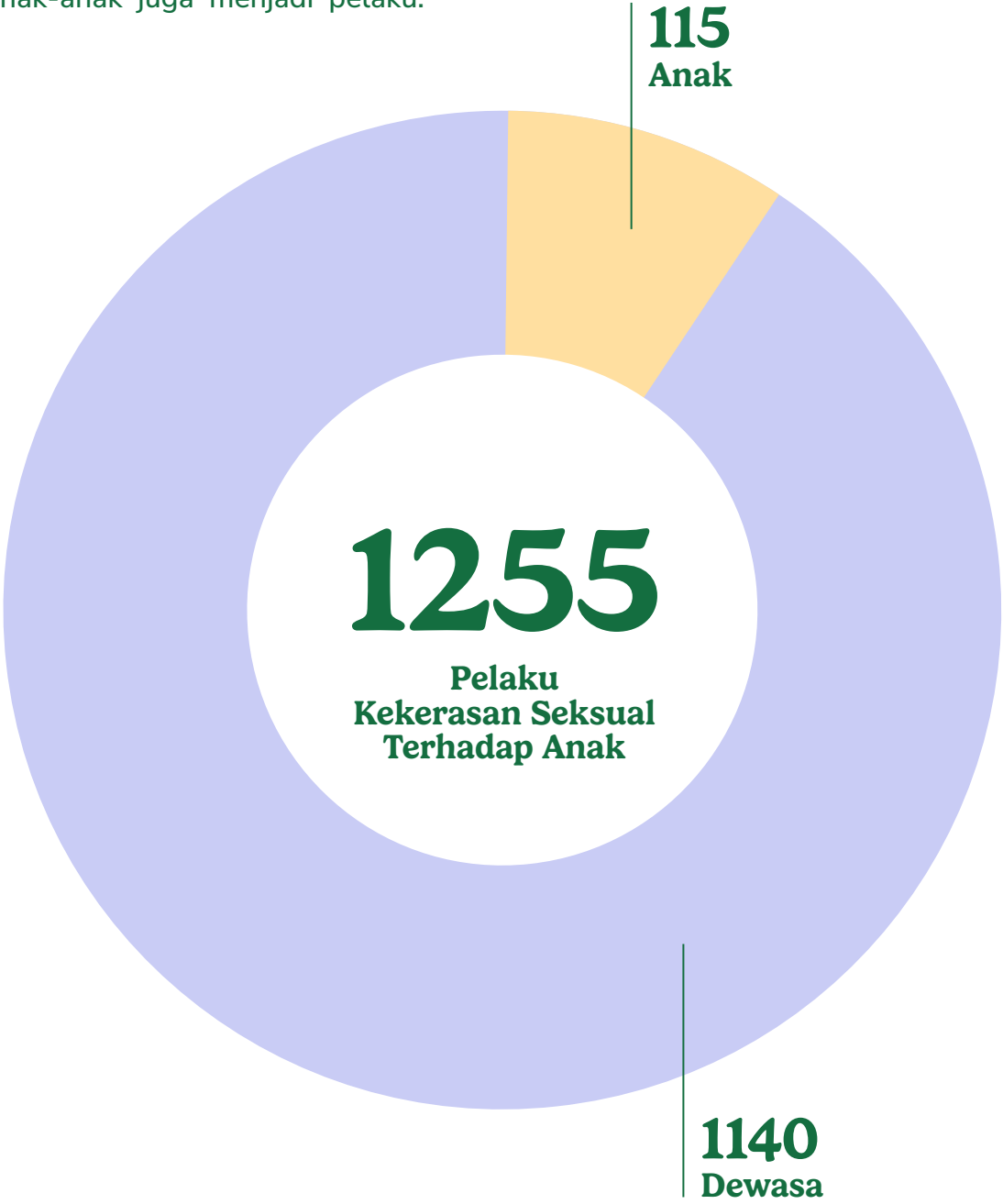
Korban kekerasan dan eksploitasi seksual anak di Indonesia berasal dari berbagai rentang usia, mulai dari bayi berusia 1 bulan hingga remaja berusia 17 tahun.

Kelompok usia yang paling banyak menjadi korban berada dalam rentang 11 hingga 16 tahun, menunjukkan bahwa anak-anak di usia pra-remaja dan remaja awal menjadi kelompok yang paling rentan terhadap kekerasan dan eksploitasi seksual.

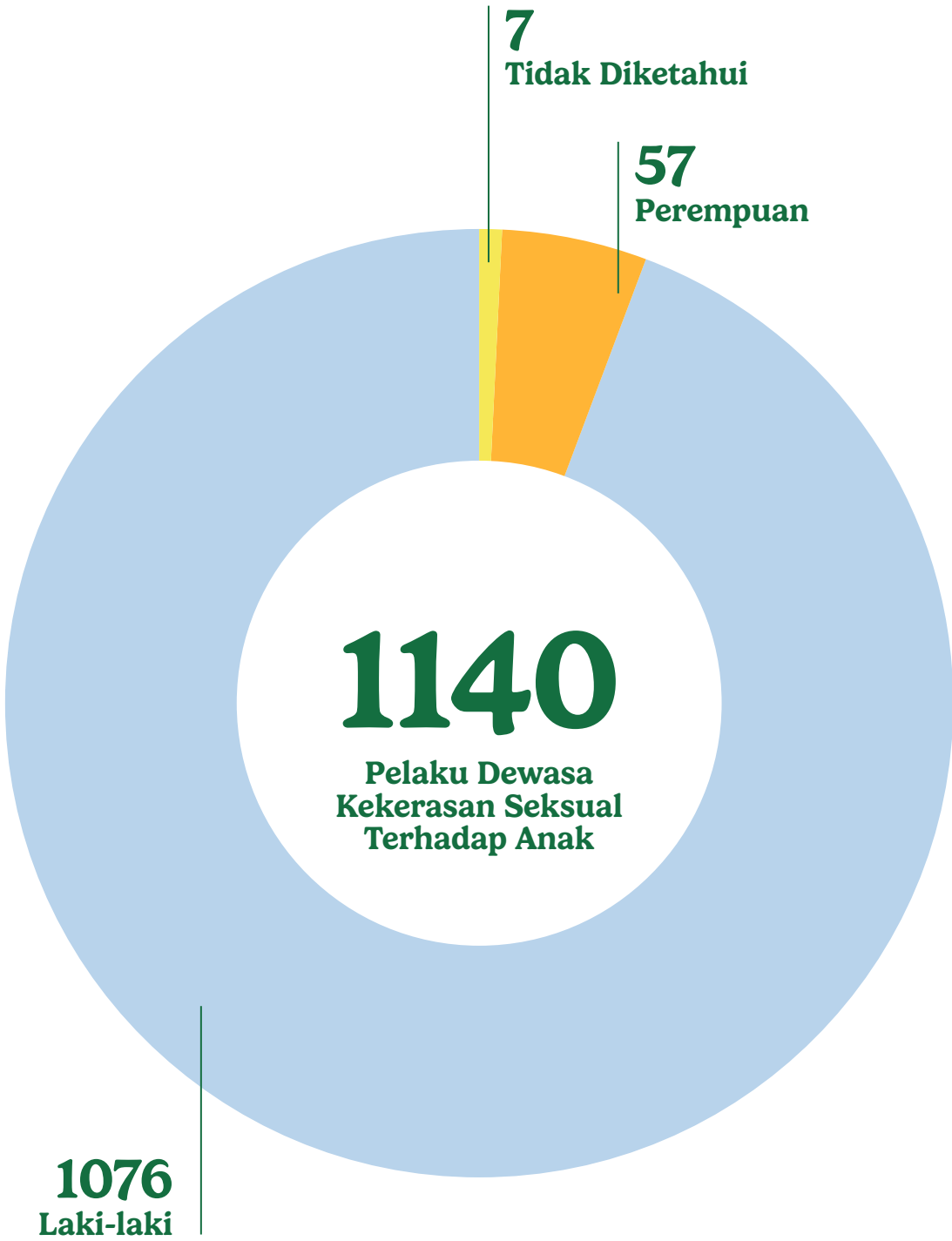
Usia Korban	Jumlah Kasus
2 Bulan	1
4 Bulan	1
1 Tahun	1
2 Tahun	6
3 Tahun	6
4 Tahun	24
5 Tahun	38
6 Tahun	35
7 Tahun	45
8 Tahun	86
9 Tahun	60
10 Tahun	62
11 Tahun	85
12 Tahun	114
13 Tahun	121
14 Tahun	105
15 Tahun	85
16 Tahun	81
17 Tahun	66
Tidak Diketahui	856
Grand Total	1877

Pelaku Kekerasan dan Eksploitasi Seksual Anak Tahun 2024

Sepanjang tahun 2024, tercatat 1.255 pelaku dalam kasus kekerasan dan eksploitasi seksual terhadap anak di Indonesia. Dari jumlah tersebut, mayoritas pelaku adalah orang dewasa, namun terdapat pula kasus di mana anak-anak juga menjadi pelaku.



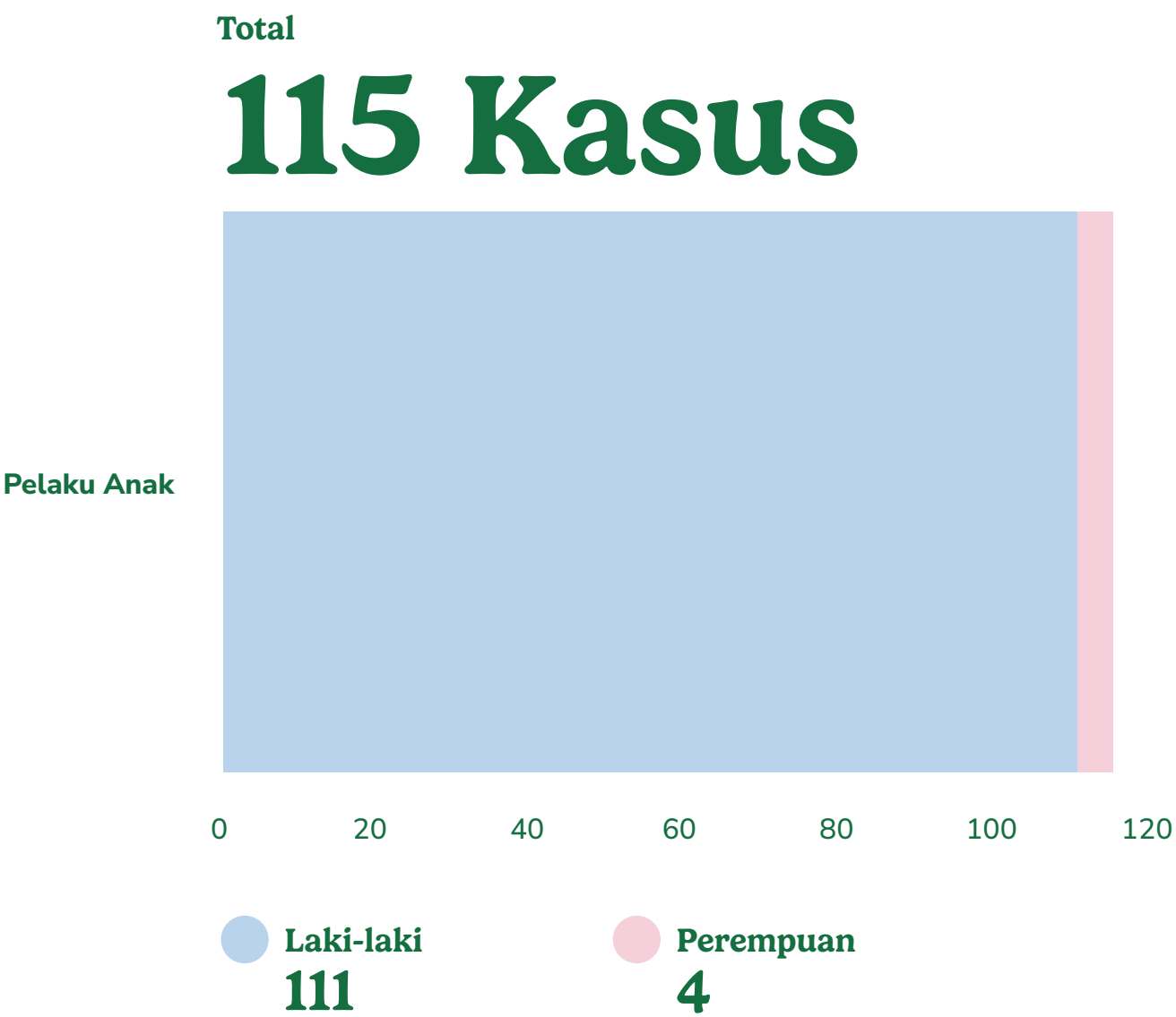
Jenis Kelamin Pelaku Dewasa Kekerasan dan Eksploitasi Seksual Anak Tahun 2024



Data ini menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku kekerasan dan eksploitasi seksual terhadap anak adalah laki-laki dewasa.

Jenis Kelamin Pelaku Anak Kekerasan dan Eksploitasi Seksual Anak Tahun 2024

Namun, kehadiran pelaku dari kelompok anak juga menjadi perhatian serius, mengingat faktor lingkungan, normalisasi kekerasan, serta pengaruh digital yang dapat berkontribusi terhadap keterlibatan anak dalam tindakan kekerasan dan eksploitasi seksual.



Warga Negara Pelaku Kekerasan dan Eksploitasi Seksual Anak Tahun 2024

Dalam temuan, mayoritas pelaku kekerasan dan eksploitasi seksual terhadap anak adalah warga negara Indonesia (WNI). Namun, terdapat juga kasus yang melibatkan warga negara asing (WNA).

Dari total 909 kasus yang teridentifikasi 906 kasus melibatkan pelaku WNI dan 3 kasus melibatkan pelaku WNA.



Meskipun jumlah kasus yang melibatkan WNA relatif kecil, hal ini tetap menjadi perhatian serius, terutama terkait dengan perlindungan anak dari eksploitasi oleh pelaku lintas negara. Penguatan pengawasan di sektor pariwisata, digital, serta kerja sama internasional menjadi langkah penting dalam mencegah eksploitasi seksual anak oleh pelaku asing di Indonesia.

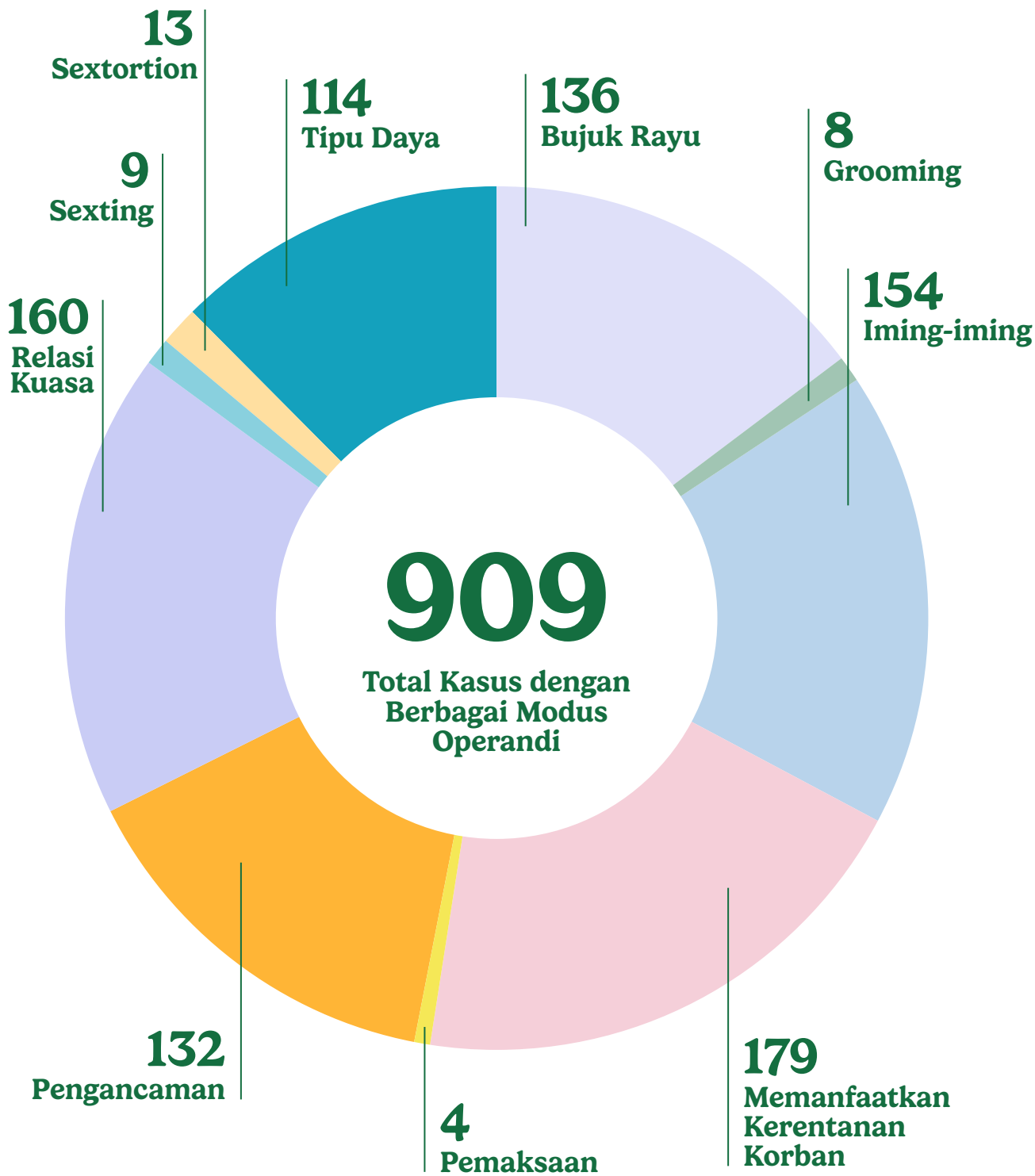
Relasi Antara Pelaku dan Korban Kekerasan dan Eksploitasi Seksual Anak

Banyak pelaku kekerasan dan eksploitasi seksual terhadap anak memiliki hubungan yang cukup dekat dengan korban. Temuan ini mengindikasikan bahwa eksploitasi dan kekerasan seksual terhadap anak sering kali terjadi di lingkungan yang seharusnya memberikan perlindungan.

Relasi Pelaku Dengan Korban	Jumlah Kasus
ART	2
Ayah	91
Ayah Tiri	91
Guru	98
Ibu	6
Kakak	2
Kakak tiri	2
Kakek	8
Kakek Tiri	1
Kenalan	32
Kerabat	32
Majikan	6
Mantan pacar	5
Mucikari	36
N/A	35
Orang Tidak Dikenal	190
Pacar	51
Pacar ibu	3
Pemilik Indekos	2
Pemilik Warung	2
Pengurus Pondok	11
Penyedia pekerjaan	5
Pimpinan Pondok Pesantren	4
Teman	36
Tetangga	157
Tokoh Agama	1
Grand Total	909

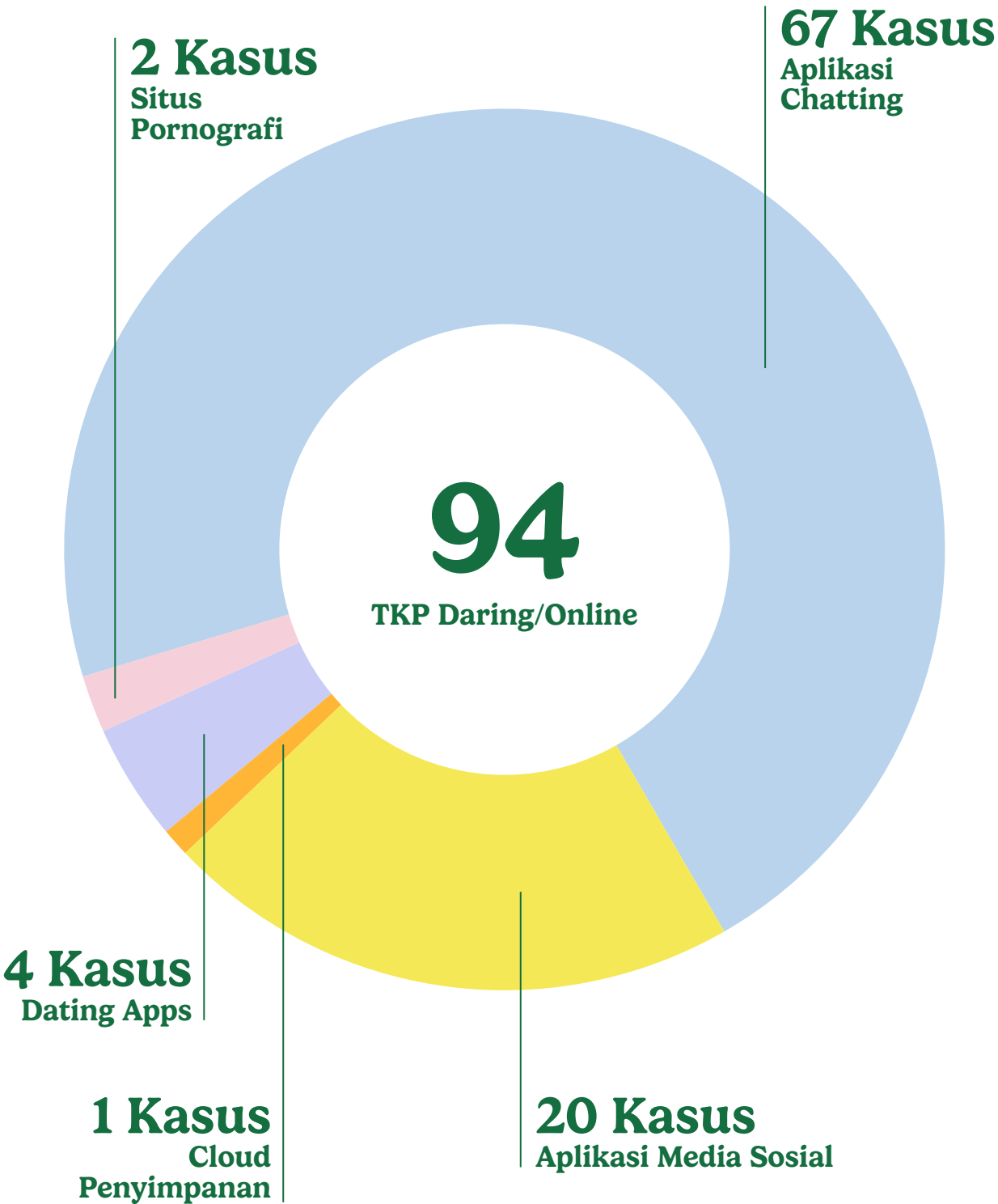
Modus Operandi Yang Digunakan Pelaku Kekerasan dan Eksploitasi Seksual Anak Tahun 2024

Modus yang dipakai dalam melancarkan aksinya pun berbagai macam, mulai dari melakukan bujuk rayu dan memberikan iming-iming,serta memanfaatkan kerentanan korban dan penggunaan relasi kuasa yang cukup banyak dipakai sebagai modus dalam melakukan kekerasan dan eksploitasi seksual terhadap anak di Indonesia.



TKP Daring/Online Kasus Kekerasan dan Eksploitasi Seksual Anak Tahun 2024

Dari pemantauan media ECPAT Indonesia juga mengkategorikan tempat kejadian perkaranya (TKP) yang terjadi di beberapa tempat dan juga terbagi ruang yaitu, TKP yang berada di ruang daring/online dan TKP yang langsung/offline.



TKP Langsung/Offline Kasus Kekerasan dan Eksploitasi Seksual Anak Tahun 2024

TKP Offline	Jumlah Kasus
Apartemen/Wisma/Rusun/Hotel	41
Cafe	1
Fasilitas Keagamaan	12
Fasilitas Umum	48
Indekos	48
Institusi Kepolisian	1
Institusi Pendidikan / Berbasis Keagamaan	71
Kantor	1
Kebun / Tempat Terbuka	53
Kendaraan	3
Panti Asuhan	2
Rumah Dinas	3
Rumah Kerabat	3
Rumah Korban	145
Rumah Kosong	10
Rumah Pelaku	381
Tempat Hiburan	7
Tempat Prostitusi	2
Warung	1
Grand Total	833

Penyebaran Kasus Kekerasan dan eksploitasi Seksual Anak Tahun 2024

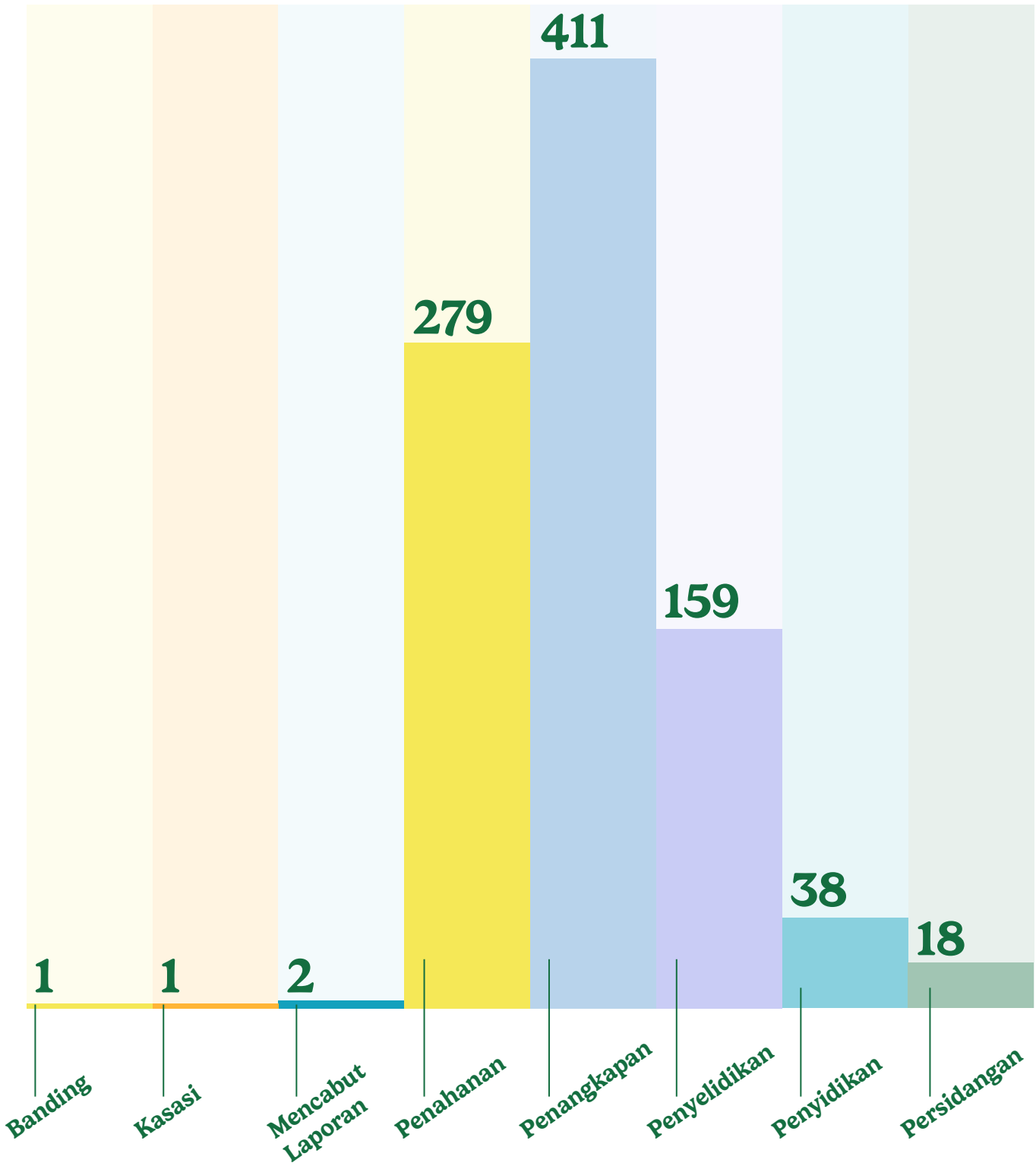
Untuk wilayah terjadinya kekerasan dan eksploitasi seksual terhadap anak terjadi di hampir seluruh wilayah Indonesia, ada 34 provinsi yang terdapat kasus kekerasan dan eksploitasi seksual terhadap anak di Indonesia selama tahun 2024.

Hal ini membuktikan bahwa angka kasus kekerasan dan eksploitasi seksual terhadap anak di Indonesia masih tetap tinggi dengan penyebaran kasus kekerasan dan eksploitasi seksual terhadap anak yang terjadi di 34 provinsi yang ada di Indonesia. Hasil pemantauan media ini bisa menjadi dasar untuk membuat melakukan advokasi kebijakan dalam mencegah dan menurunkan angka kekerasan dan eksploitasi seksual terhadap anak di Indonesia.

Provinsi	Jumlah Kasus
Aceh	13
Bali	17
Banten	41
Bengkulu	12
Daerah Istimewa Yogyakarta	19
DK Jakarta	42
Gorontalo	4
Jambi	13
Jawa Barat	97
Jawa Tengah	69
Jawa Timur	115
Kalimantan Barat	28
Kalimantan Selatan	14
Kalimantan Tengah	14
Kalimantan Timur	34
Kalimantan Utara	10
Kepulauan Bangka Belitung	17
Kepulauan Riau	26
Lampung	41
Maluku	22
Maluku Utara	3
Nusa Tenggara Barat	27
Nusa Tenggara Timur	24
Papua	6
Papua Barat	1
Papua Barat Daya	1
Riau	42
Sulawesi Barat	6
Sulawesi Selatan	25
Sulawesi Tengah	7
Sulawesi Tenggara	8
Sulawesi Utara	12
Sumatera Barat	27
Sumatera Selatan	27
Sumatera Utara	45
Grand Total	909

Proses Hukum Kasus Kekerasan dan Eksploitasi Seksual Anak Tahun 2024

Untuk posisi hukum kasus kekerasan dan eksploitasi seksual terhadap anak dari hasil pemantauan media yang dilakukan oleh ECPAT Indonesia dari 909 kasus yang tercatat, semua kasus ini sudah masuk kedalam proses hukum, mulai dari penyidikan di kepolisian sampai tingkat Kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia.

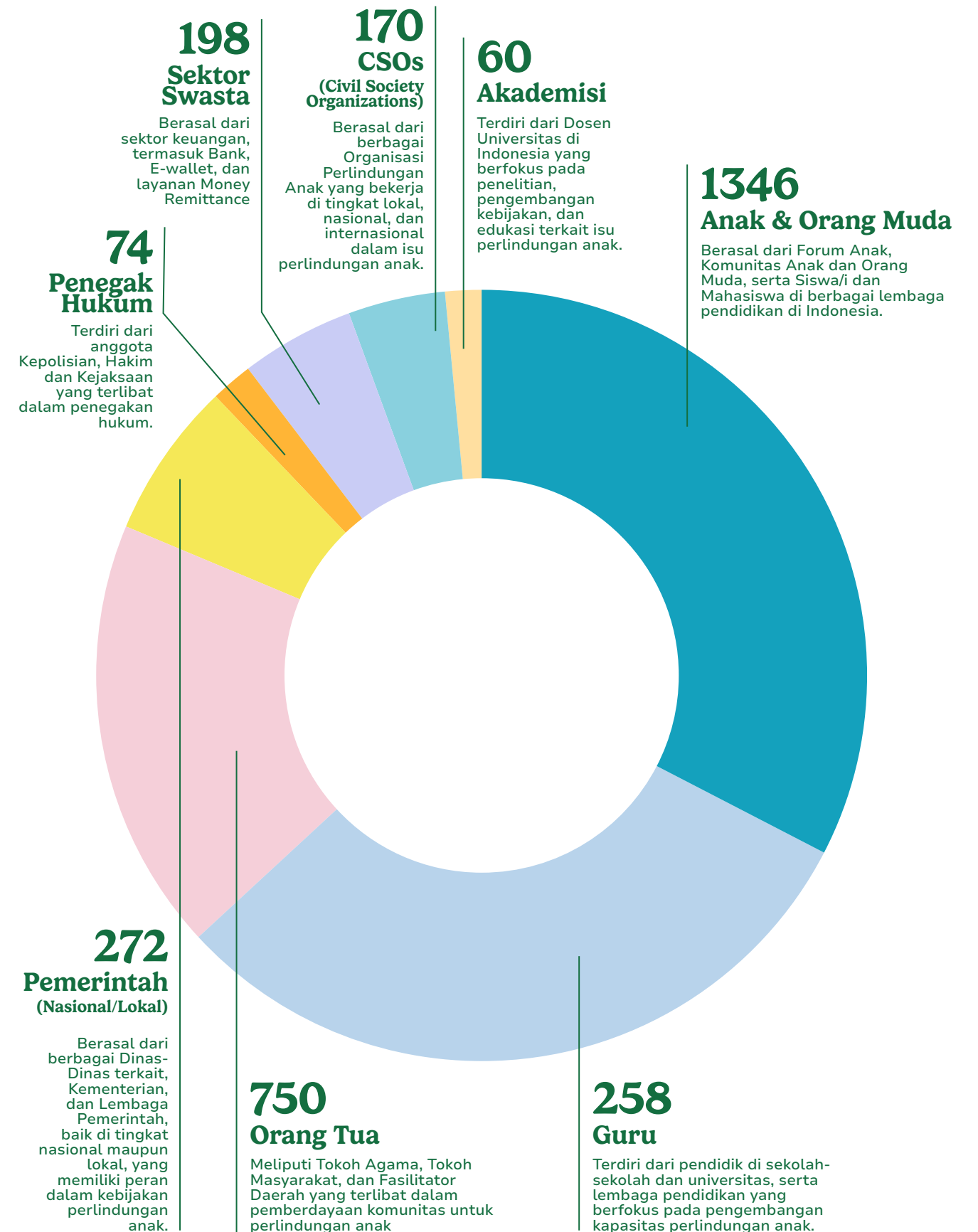


Program ECPAT Indonesia 2024

Wilayah Program 2024



Jangkauan Penerima Manfaat Program 2024



A. Riset

Penelitian Penyalahgunaan Produk dan Layanan Jasa Keuangan untuk Eksploitasi Seksual Anak di Indonesia

ECPAT Indonesia melakukan penelitian tentang penyalahgunaan produk dan layanan keuangan untuk eksploitasi seksual anak (ESA). Studi ini mengidentifikasi pola penyalahgunaan, faktor penyebab, serta strategi pencegahan. hasilnya digunakan untuk menyusun Indikator Red Flag Transaksi Keuangan Mencurigakan terkait ESA dan mendukung advokasi berbasis bukti di tingkat nasional dan global.

Penelitian Strategi Pencegahan Eksploitasi Seksual Anak Melalui Kerjasama dengan Kepolisian

ECPAT Indonesia juga menyelesaikan penelitian tentang strategi pencegahan ESA melalui peningkatan kerjasama dengan kepolisian, yang bertujuan untuk memahami peluang, tantangan, dan hambatan dalam penerapan model pencegahan kekerasan dan eksploitasi seksual anak. Temuan dari penelitian ini memberikan panduan strategis untuk meningkatkan efektivitas kolaborasi lintas sektor dalam upaya pencegahan.

Pemetaan Situasi Pekerja Anak di Sektor Pariwisata di Bali

Selain itu, pemetaan situasi pekerja anak di sektor pariwisata di Desa Tianyar (Kabupaten Karangasem) dan Ubud (Kabupaten Gianyar), Bali, dilakukan untuk mengidentifikasi akar permasalahan, faktor pendukung, serta solusi dalam pencegahan dan penanganan pekerja anak. Hasilnya, sebuah Rencana Aksi Penanggulangan dan Penghapusan Pekerja Anak disusun untuk pendampingan pada tahun 2026–2024.

Pemetaan Situasi Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Eksploitasi Seksual Anak di Jakarta Timur

ECPAT Indonesia juga memetakan situasi tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan eksploitasi seksual anak di Jakarta Timur, sebagai salah satu wilayah yang banyak terjadi kasus eksploitasi seksual anak. Penelitian ini bertujuan untuk memahami kondisi serta kebutuhan korban dan penyintas TPPO dan ESA guna mendukung proses pendampingan di masa mendatang. Responden terdiri dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA), Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, serta 25 anak korban dan penyintas yang berasal dari dampingan UPT PPA DKI Jakarta dan Bandung Wangi. Keberhasilan penelitian ini adalah tersusunnya pemetaan situasi dan kebutuhan korban sebagai dasar pendampingan pada tahun 2025.



Foto: Riset Penyedia Jasa Keuangan (PJK)



Foto: Riset Kepolisian



Foto: Riset Pekerja Anak



Foto: Laporan Pemetaan

B. Advokasi

Advokasi ECPAT Indonesia di Tingkat Nasional

Pada tahun ini, ECPAT Indonesia berperan aktif dalam berbagai inisiatif advokasi perlindungan anak di tingkat nasional. Salah satu pencapaiannya adalah keterlibatan kami dalam **penyusunan Peraturan Presiden tentang Peta Jalan Perlindungan Anak di Ranah Daring**, yang disusun bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) serta UNICEF Indonesia. Peraturan Presiden ini bertujuan untuk menjadi panduan strategis dalam meningkatkan perlindungan anak di era digital.

Selain itu, ECPAT Indonesia bersama KemenPPPA mengadakan **Rapat Koordinasi Child Safeguarding dalam Transaksi Keuangan Elektronik**, yang mempertemukan pemangku kepentingan dari sektor keuangan, termasuk PPATK, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Bank Indonesia. Rapat ini bertujuan untuk memperkuat kolaborasi dalam pencegahan dan penanganan eksploitasi seksual anak melalui sistem keuangan. Dalam pertemuan tersebut, KemenPPPA menginisiasi rencana penyusunan Nota Kesepahaman (MoU) untuk memperkuat sinergi dengan pihak-pihak terkait.

ECPAT Indonesia juga bekerja sama dengan PPATK dalam **penyusunan Indikator Red Flag Transaksi Keuangan Mencurigakan yang Terindikasi Kejahatan Eksploitasi Seksual Anak (ESA)**. Sebagai satu-satunya perwakilan organisasi masyarakat sipil dalam proses ini, ECPAT Indonesia

turut menyumbangkan data dari penelitian nasional dan konferensi regional serta internasional, termasuk temuan mengenai tren baru dalam eksploitasi seksual anak yang melibatkan sektor keuangan. Indikator Red Flag ini mencakup tipologi serta studi kasus untuk mengidentifikasi potensi penyalahgunaan sistem keuangan dalam kejahatan ESA.

Di Tahun ini juga, **ECPAT Indonesia memperkuat advokasi nasional dengan membuka cabang ECPAT Bali**. Saat ini, ECPAT Bali juga menjadi bagian dari JAGAT Bali (Jaringan Advokasi & Gerakan Anti Kekerasan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Bali). Jaringan ini dimulai oleh kelompok organisasi pegiat isu anak dan kekerasan terhadap perempuan di Bali sebagai bentuk komitmen, kolaborasi, dan penguatan upaya perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan.



Foto: Rapat Penyusunan Indikator



Foto: Rapat Child Safeguarding



Foto: ECPAT Bali



Foto: Kerjasama ECPAT dengan Swiss-belhotel International Indonesia

Dalam sektor pariwisata, ECPAT Indonesia pada tahun ini menjalin kerja sama dengan Swiss-Belhotel International Indonesia, yang merupakan bagian dari program Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan tersebut, untuk memperkuat upaya melindungi anak-anak Indonesia dari eksploitasi. Melalui kolaborasi ini, Swiss-Belhotel International Indonesia akan mengintegrasikan kebijakan perlindungan anak dalam operasionalnya, serta mendukung kampanye kesadaran, pelatihan staf, dan pemberdayaan masyarakat guna memastikan anak-anak terlindungi dari eksploitasi.



Foto: Kerjasama ECPAT dengan Swiss-belhotel International Indonesia

Advokasi ECPAT Indonesia di Tingkat Regional dan Global

ECPAT Indonesia menginisiasi Konferensi ASEAN tentang Pencegahan Penyalahgunaan Layanan Keuangan untuk Eksploitasi Seksual Anak, yang dihadiri lebih dari 200 peserta dari berbagai sektor. Konferensi ini menghasilkan “Rekomendasi Denpasar”, sebuah panduan strategis untuk memperkuat pencegahan di tingkat nasional dan regional. Rekomendasi Denpasar dapat diakses pada tautan berikut: <https://ecpatindonesia.org/e-library/>

Dalam ASEAN ICT Forum, ECPAT Indonesia mengadakan sesi breakout bertema “Peran dan Tanggung Jawab Institusi Keuangan dalam Perlindungan Anak Online,” membahas penyalahgunaan layanan keuangan dalam



Foto: Asean Conference



Foto: Asean ICT Forum

transaksi eksploitasi seksual anak. Forum ini dihadiri oleh International Justice Mission, National Australia Bank, dan PPATK, yang berbagi wawasan terkait strategi perlindungan anak di sektor keuangan.

Di Asia Pacific Internet Governance Forum (APrIGF) Taiwan, ECPAT Indonesia berkontribusi dalam diskusi bertema “Securing Trust: Ethical Governance in Championing Children’s Digital Rights,” menekankan pentingnya pelibatan anak dalam tata kelola digital yang etis. ECPAT mendorong anak-anak Asia menjadi pembicara ahli dalam menyuarakan pengalaman digital mereka guna memastikan kebijakan yang lebih relevan dan responsif

Secara global, ECPAT Indonesia berpartisipasi dalam WeProtect Global Alliance Summit di Abu Dhabi, yang dihadiri lebih dari 600 pemangku kepentingan. Diskusi utama mencakup tantangan regulasi teknologi,



Foto: Asia Pacific Internet Governance Forum



Foto: WeProtect Global Alliance Summit di Abu Dhabi

penyalahgunaan AI untuk materi pelecehan seksual anak, serta kesehatan mental pekerja garis depan. ECPAT memanfaatkan forum ini untuk membangun jaringan dengan National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC) dan OpenAI, membuka peluang kolaborasi dalam penguatan kapasitas penegak hukum dan literasi AI untuk perlindungan anak.

Selain itu, ECPAT Indonesia terlibat dalam studi tentang Voluntourism yang diinisiasi oleh ECPAT International. Studi ini menyoroti tren wisata berbasis sukarelawan yang melibatkan interaksi dengan anak-anak, termasuk anak dengan disabilitas, di panti, sekolah, dan komunitas lokal. Tanpa regulasi yang ketat, Voluntourism dapat membuka celah bagi eksploitasi anak, termasuk risiko grooming oleh predator seksual. Hasil studi ini, yang menekankan pentingnya kebijakan child safeguarding dalam kegiatan Voluntourism, akan diluncurkan pada 3 April 2025.



Foto: WeProtect Global Alliance Summit di Abu Dhabi

C. Peningkatan Kapasitas

Desa Bebas Pornografi Anak

Program ini telah mendampingi pemerintah dan para pemangku kepentingan desa dalam membangun sistem pencegahan pornografi anak yang lebih efektif. Hingga saat ini, program telah berhasil dilaksanakan di 54 desa yang tersebar di 19 kota/kabupaten. Pada tahun 2024, bimbingan teknis terakhir dilaksanakan di 28 kampung/desa/kelurahan yang berlokasi di Lampung Tengah, Depok, Sleman, dan Bekasi.

Desa Wisata Ramah Anak Bebas dari Kekerasan dan Eksploitasi

Program ini dirancang untuk mengembangkan desa wisata agar menjadi lingkungan yang ramah perempuan dan anak, sekaligus berperan aktif dalam pencegahan dan penanganan eksploitasi seksual anak. Hingga saat ini, program telah dilaksanakan di 14 desa/kelurahan/kampung yang tersebar di 6 kota. Salah satu kegiatan terbaru adalah pelaksanaan monitoring dan evaluasi (monev) di Kabupaten Magelang, Toba, dan Bogor. Program ini menyasar berbagai pihak, termasuk desa, kelurahan, pemerintah kabupaten/kota, serta seluruh pemangku kepentingan pariwisata.

Peningkatan Kapasitas UPTD PPPA untuk Penanganan Korban Kekerasan dan Eksploitasi Seksual Anak

Pelatihan ini meliputi kebijakan perlindungan anak, manajemen kasus, penguatan hukum, pengelolaan hotline, serta pelatihan lain yang relevan. Sebagai salah satu hasil dari program ini, telah disusun buku panduan untuk UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA). Panduan ini mencakup prosedur penanganan kasus, penguatan Standar Operasional Prosedur (SOP), serta penerapan kode etik. Program ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan, tetapi juga memastikan perlindungan yang lebih baik bagi anak-anak korban eksploitasi seksual.

Pelatihan Uji Tuntas tentang Penghapusan Pekerja Anak untuk Asosiasi Pariwisata

Pelatihan uji tuntas bagi DMC dan asosiasi dalam konsorsium ANVR bertujuan untuk membekali mereka dengan praktik uji tuntas, memperkuat tanggung jawab sosial dan manajemen bisnis, serta mendorong penghapusan pekerja anak di sektor pariwisata. Selain itu, pelatihan ini juga memberdayakan pemandu wisata untuk mengidentifikasi dan mencegah pekerja anak dalam operasi bisnis.



Foto: Desa Bebas Pornografi Anak



Foto: Program desa wisata ramah anak bebas dari kekerasan dan eksploitasi



Foto: Pelatihan Peningkatan Kapasitas UPTD PPPA



Foto: Pelatihan Uji Tuntas

Pelatihan Praktek Pencegahan Pekerja Anak untuk Pemandu Wisata/Tour Guide

Secara khusus tujuan dari pelatihan pencegahan pekerja anak di sektor pariwisata untuk tour guide ini antara lain:

1. Membekali operasional pemandu wisata dengan pengetahuan yang diperlukan untuk menerapkan praktik-praktik penghapusan pekerja anak.
2. Untuk mengidentifikasi dan mencegah aktivitas pekerja anak dalam operasional bisnis.
3. Untuk memahami peran pemandu wisata dalam pelaporan dan inisiatif penghapusan pekerja anak dalam operasi mereka.

Pelatihan Tindak Pidana Mempekerjakan Anak dan Eksploitasi Anak

Pelatihan yang diselenggarakan bersama kejaksaan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman para jaksa penuntut umum dalam menyusun tuntutan terkait kasus pelanggaran ketenagakerjaan yang melibatkan anak-anak, terutama dalam situasi yang membahayakan hak dan kesejahteraan mereka. Pelatihan ini diikuti oleh 35 peserta yang berasal dari 10 wilayah, yaitu Jakarta, Bandung, Labuan Bajo, Medan, Surabaya, Pontianak, Yogyakarta, Bali, Nunukan, dan Nusa Tenggara Barat (NTB). Diharapkan melalui pelatihan ini, para jaksa dapat lebih efektif dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan anak-anak dan memastikan perlindungan yang optimal bagi mereka.



Foto: Pelatihan praktek pencegahan pekerja anak untuk pemandu wisata



Foto: Pelatihan tindak pidana mempekerjakan anak dan eksploitasi anak

D. Partisipasi Anak dan Peningkatan Kesadaran Masyarakat

Suara Anak untuk Perubahan (Youth Voice for Change)

Youth Voices for Change (YVFC) adalah program Down to Zero (Dtz) dalam penguatan kapasitas anak dan orang muda sebagai agen perubahan. Program ini yang mengumpulkan pemimpin muda dari berbagai wilayah untuk menjadi agen yang menciptakan ide-ide inovatif dan membawa perubahan positif di komunitas, bekerja sama dengan sesama anak muda, pembuat kebijakan, dan masyarakat sipil. Program ini menyediakan ruang diskusi dan pelatihan untuk membuat produk kampanye yang membantu orang memengaruhi pembuat kebijakan di tingkat nasional dan internasional.



Foto: Program Suara Anak untuk Perubahan

Program Internet Aman Untuk Anak (Tem@n Anak)

Bersama YouTube dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, di selenggarakan Seminar Tem@n Anak di lima kota, yaitu Jakarta, Tangerang, Bogor, Cianjur, dan Indramayu, yang dihadiri oleh 2.000 peserta, terdiri dari orang tua, guru, perangkat desa/kelurahan, serta tokoh agama dan masyarakat setempat. Seminar ini mengangkat tema perlindungan anak di ranah daring, pemanfaatan aplikasi atau alat digital untuk mengawasi anak, serta digital parenting. Selain itu, seminar ini juga menghasilkan rencana tindak lanjut yang dapat diterapkan oleh guru dan disebarluaskan di sekolah masing-masing.



Foto: Program Tem@n Anak

Program Aku Muda Aku Nyaman (AMAN Program)

Saat ini, lebih dari 50 Aman Warrior aktif terlibat dalam kampanye edukasi tentang keamanan anak di ranah daring, dengan sebagian di antaranya yang juga merupakan anggota Forum Anak turut melakukan sosialisasi di komunitas masing-masing. Fokus utama Aman Warrior saat ini adalah kampanye melalui media sosial, khususnya Instagram @amanwarrior.id, dengan didukung oleh tim kreatif bernama AMAN Creative Team (ACREAM) yang bertanggung jawab dalam pengelolaan dan produksi konten edukatif.



Foto: AMAN Warrior

Perayaan Hari Internet Aman, Hari Anak Nasional & Internasional

Bersama Pemerintah, Platform Digital, dan Organisasi Masyarakat Sipil, perayaan ECPAT Indonesia merayakan Safer Internet Day (SID) 2024 bersama pemerintah, platform digital, dan organisasi masyarakat sipil, melibatkan 250 anak dan orang muda dalam diskusi interaktif tentang tantangan dan inovasi di dunia daring, serta sosialisasi Perpres Peta Jalan Anak. Dalam Hari Anak Nasional (HAN) 2024, ECPAT bekerja sama dengan YouTube dan KemenPPPA mengadakan diskusi panel di Lokakarya FAN tentang partisipasi anak dalam keamanan digital, menghadirkan tokoh publik dan influencer, serta booth edukatif interaktif. Sementara itu, pada Hari Anak Sedunia bertema “Listen to the Future,” lebih dari 380 anak mengikuti diskusi interaktif yang mendorong mereka menjadi agen perubahan di dunia digital, dengan inspirasi dari kreator YouTube mengenai konten edukatif inovatif.



Foto: Perayaan Hari Anak Nasional

Keberhasilan Program

Penguatan Kebijakan Nasional

ECPAT Indonesia bersama ID-COP melakukan advokasi Peraturan Presiden (Perpres) tentang Peta Jalan Perlindungan Anak, yang saat ini telah masuk ke Sekretariat Negara untuk ditelaah oleh tim kepresidenan. Langkah ini menjadi tonggak penting dalam memastikan kebijakan perlindungan anak diakomodasi dalam peraturan nasional.

Pemetaan Penyalahgunaan Penyedia Jasa Keuangan dalam Eksploitasi Seksual Anak

Berdasarkan hasil riset, ECPAT Indonesia telah berhasil memetakan situasi penyalahgunaan penyedia jasa keuangan dalam eksploitasi seksual anak. Pemetaan ini juga menjadi landasan bagi Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam upaya perlindungan anak.

Peningkatan Pengawasan Transaksi Keuangan Terkait Eksploitasi Seksual Anak

PPATK menetapkan eksploitasi seksual anak sebagai salah satu isu prioritas. ECPAT Indonesia dilibatkan dalam penyusunan Red Flag Indicator untuk transaksi keuangan

mencurigakan terkait eksploitasi seksual anak (Child Sexual Exploitation/CSE), sebagai upaya konkret dalam mendeteksi dan mencegah kejahatan ini.

Komitmen Sektor Swasta dalam Perlindungan Anak di Industri Pariwisata

Kesadaran sektor swasta terhadap perlindungan anak semakin meningkat. Swiss-Belhotel International serta perusahaan travel dalam destination management company, mitra ANVR, bekerja sama dengan ECPAT dan mulai mengambil langkah aktif untuk mencegah eksploitasi seksual anak di sektor pariwisata.

Dukungan Kejaksaan dalam Pencegahan Eksploitasi Seksual Anak dan Pekerja Anak

Kejaksaan menunjukkan komitmen lebih kuat dengan memperkuat kerja sama dengan ECPAT Indonesia dalam menangani isu pekerja anak dan eksploitasi seksual anak, guna memastikan perlindungan hukum yang lebih efektif bagi anak-anak.

Penguatan Perlindungan Anak di Platform Digital

Platform digital telah menunjukkan komitmen lebih besar dalam melindungi anak dari kekerasan dan eksploitasi seksual online, sejalan dengan meningkatnya risiko ancaman di dunia maya. Hal ini ditunjukkan dengan adanya kerja sama antara ECPAT, organisasi masyarakat sipil (CSO), dan platform digital dalam kampanye publik tentang perlindungan anak online.

Inisiatif Desa dalam Mewujudkan Wisata Ramah Anak

Pemerintah desa, dengan dukungan ECPAT, menginisiasi kebijakan berbasis komunitas untuk menciptakan wisata ramah anak yang bebas dari eksploitasi. Inisiatif ini memperkuat pendekatan perlindungan anak berbasis masyarakat.

Panduan Penanganan dan Pendampingan Korban Eksploitasi Seksual Anak

ECPAT, bekerja sama dengan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) dampingan, telah menyusun panduan khusus mengenai penanganan dan pendampingan korban eksploitasi seksual anak. Panduan ini kini telah digunakan secara internal oleh UPTD PPA, memperkuat mekanisme perlindungan bagi korban.

Kolaborasi Multi-Pihak dalam Perlindungan Anak Online

Pemangku kepentingan dari berbagai sektor semakin aktif berkolaborasi dalam perlindungan anak online dan pencegahan eksploitasi seksual anak, menciptakan sinergi yang lebih kuat dalam menangani isu ini.

Keterlibatan Badan Regional dalam Pencegahan Eksploitasi Seksual Anak

Kerja sama antara ECPAT Indonesia dengan ASEAN Secretariat dan ASEAN Commission on the Promotion and Protection of the Rights of Women and Children (ACWC Indonesia) semakin diperkuat dalam mendukung upaya pencegahan dan respons terhadap eksploitasi seksual anak di tingkat regional.

Lahirnya Trainer dan Pendidik di Berbagai Sektor

Berbagai pihak, termasuk penyedia layanan korban, penegak hukum, anak, dan kaum muda, telah dilatih sebagai trainer dalam isu eksploitasi seksual anak oleh ECPAT. Ini memperkuat kapasitas mereka dalam mengedukasi komunitas dan kelembagaan mereka mengenai perlindungan anak.

Partisipasi Bermakna Anak dan Orang Muda

Anak-anak dan kaum muda semakin aktif berkontribusi dalam menciptakan inisiatif terkait pencegahan eksploitasi seksual anak dan literasi digital, memperkuat peran mereka sebagai agen perubahan.

Pembentukan Forum Anak di Desa

Dua desa yang sebelumnya belum memiliki forum anak kini telah membentuk wadah partisipasi anak. Forum ini menjadi ruang penting bagi anak-anak untuk menyuarakan hak mereka dan berpartisipasi dalam perlindungan anak di tingkat lokal.



Tantangan dan Hambatan Program

Upaya pencegahan dan penanganan eksploitasi seksual anak masih menghadapi berbagai tantangan dan hambatan yang perlu diatasi secara strategis.

Beberapa tantangan utama yang dihadapi antara lain:

01 Eksploitasi seksual anak belum menjadi prioritas nasional

Isu eksploitasi seksual anak masih belum mendapatkan perhatian yang cukup sebagai prioritas nasional. Hal ini mengakibatkan perlunya advokasi yang lebih intensif.

02 Lambatnya proses legislasi Peraturan Presiden Peta Jalan Perlindungan Anak di Ranah dalam Jaringan

Penyusunan legislasi terkait perlindungan anak di ranah digital oleh pemerintah berjalan cukup lama, sehingga hingga saat ini Indonesia belum memiliki peraturan yang dilegalisasi terkait perlindungan anak online.

03 Kurangnya komitmen donor dalam keberlanjutan program

Minimnya komitmen donor dalam mendukung keberlanjutan program berdampak pada keterbatasan sumber daya yang tersedia. Akibatnya, implementasi program jangka panjang menjadi terhambat.

04 Kurangnya komitmen peserta pelatihan di beberapa daerah

Di beberapa daerah, tingkat kesadaran terhadap isu perlindungan anak masih rendah, sehingga sebagian peserta pelatihan tidak menunjukkan komitmen yang kuat.

05 Kurangnya perspektif hak anak dalam beberapa pihak yang dijangkau

Pendekatan berbasis hak anak belum sepenuhnya diterapkan oleh berbagai pihak yang dijangkau dalam program ini. Kurangnya pemahaman dan penerapan perspektif hak anak menghambat efektivitas upaya perlindungan dan pemenuhan hak anak secara menyeluruh.

06 Belum adanya kebijakan khusus di sektor keuangan

Sektor keuangan belum memiliki kebijakan khusus yang mengatur peran penyedia jasa keuangan dalam upaya pemberantasan eksploitasi seksual anak. Hal ini menyebabkan masih lemahnya keterlibatan sektor keuangan dalam mendukung inisiatif pencegahan dan penanganan eksploitasi seksual anak.

07 Keterbatasan Sumber Daya dalam Advokasi dan Respons Kasus

ECPAT Indonesia menghadapi tantangan dalam menjangkau pemangku kepentingan tingkat tinggi, merespons laporan kasus kekerasan dan eksploitasi seksual anak secara cepat, serta mengelola komunikasi digital akibat keterbatasan staf. Hal ini berdampak pada efektivitas advokasi, penanganan kasus, dan penyebaran informasi kepada publik. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan peningkatan kapasitas internal serta kolaborasi lebih erat dengan pemerintah, donor, dan masyarakat sipil guna memperkuat perlindungan anak di Indonesia.

Kesimpulan dan Rekomendasi

Pemantauan media yang dilakukan oleh ECPAT Indonesia pada tahun 2024 menunjukkan bahwa kekerasan dan eksploitasi seksual terhadap anak di Indonesia masih menjadi masalah serius, dengan kasus-kasus yang tersebar di berbagai wilayah.

Meskipun berbagai upaya telah dilakukan untuk menangani isu ini, angka kejahatan eksploitasi seksual anak, baik yang terjadi secara daring maupun di luar daring, tetap tinggi.

Berbagai modus baru yang digunakan pelaku, serta perkembangan teknologi digital, turut memperburuk situasi ini. Peran platform digital dan penyedia jasa keuangan dalam memutus mata rantai kejahatan ini menjadi semakin penting, terutama untuk kejahatan yang terjadi di ranah daring. Program-program dan kegiatan pencegahan harus dilanjutkan secara konsisten, sehingga kejahatan ini dapat ditekan dan Indonesia dapat terbebas dari eksploitasi seksual anak.

Untuk mempercepat upaya penghapusan eksploitasi seksual anak, ECPAT Indonesia mengajukan beberapa rekomendasi berikut:

1. Mendorong Presiden untuk menjadikan isu eksploitasi seksual anak (ESA) sebagai prioritas nasional.
2. Mempercepat pengesahan Perpres Peta Jalan Perlindungan Anak.
3. Melakukan amandemen UU Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) untuk memprioritaskan isu ESA.
4. Melalui OJK, mendorong penyedia jasa keuangan untuk menyusun Kode Etik atau SOP Kebijakan Perlindungan Anak di penyedia jasa keuangan.
5. Menyusun modul dan pelatihan bagi penyedia jasa keuangan terkait perlindungan anak.
6. Mendorong kolaborasi antara KemenPPPA, PPATK, BI, dan OJK untuk memperkuat perlindungan anak.
7. Membentuk forum Public Private Partnership untuk isu eksploitasi seksual anak.
8. Melakukan pelatihan lanjutan untuk desa binaan sesuai dengan hasil monitoring dan evaluasi yang ada.
9. Mengeluarkan kebijakan terkait pelayanan terpadu satu pintu untuk UPTD PPA.
10. Mendorong implementasi layanan inklusif 24 jam bagi korban kekerasan dan eksploitasi seksual anak sesuai dengan UU No. 12 Tahun 2022.

11. Memberdayakan UPTD PPPA yang sudah diperkuat untuk melatih UPTD PPPA lainnya dan menggunakan Tool & Checklist Safeguarding yang telah disusun.

12. Mendorong advokasi untuk menghapuskan pekerja anak di sektor pariwisata di Bali, serta memanfaatkan sebagian pendapatan daerah untuk upaya tersebut.

13. Memperkuat kembali Youth Leader dan Peer Educator yang telah dilatih oleh ECPAT dan KemenPPPA untuk meneruskan pengetahuan ke komunitas dan fasilitator di daerah.

14. Meningkatkan komitmen donor dalam mendukung proyek-proyek yang berfokus pada keberlanjutan upaya penghapusan eksploitasi seksual anak.

15. Meningkatkan kapasitas seluruh staf dalam memahami isu-isu yang berkaitan dengan eksploitasi seksual anak.

16. Menambah staf untuk penanganan kasus dan pengelolaan media publikasi guna meningkatkan efektivitas komunikasi dan advokasi.

Dengan melaksanakan rekomendasi-rekomendasi ini, diharapkan ECPAT Indonesia bersama pemangku kepentingan Indonesia dapat bergerak lebih cepat dalam mengurangi dan akhirnya menghapuskan eksploitasi seksual anak di Indonesia.

Rencana Program ECPAT 2025

Advokasi dan Kebijakan

- Terus terlibat dalam penyusunan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Peta Jalan Perlindungan Anak di Ranah Daring dan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) mengenai Tata Kelola Perlindungan Anak dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik.
- Memantau dan memberikan masukan dalam finalisasi Red Flag Indicator untuk transaksi keuangan mencurigakan terkait eksploitasi seksual anak (Child Sexual Exploitation/CSE).

Penguatan Kapasitas dan Edukasi

- Menyusun modul, media komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE), serta menyelenggarakan pelatihan bertema “Identifikasi dan Respons Transaksi Mencurigakan: Memerangi Eksploitasi Seksual Anak dengan Melibatkan Sektor Keuangan”.
- Mengadakan Focus Group Discussion (FGD) dengan tokoh adat, kepala desa, dinas terkait (PPA, desa, pariwisata, ketenagakerjaan), serta tokoh agama terkait isu pekerja anak dan eksploitasi seksual.
- Melaksanakan konsultasi publik dengan multipihak, desa dinas, dan desa adat untuk penyusunan pararem/awig-awig tentang isu pekerja anak dan eksploitasi seksual.
- Menyelenggarakan lokakarya pengembangan pedoman teknis dan instrumen terkait isu pekerja anak dan eksploitasi seksual bagi sektor swasta serta seminar dan sosialisasi pedoman teknis tersebut.

Pelayanan dan Pendampingan Korban

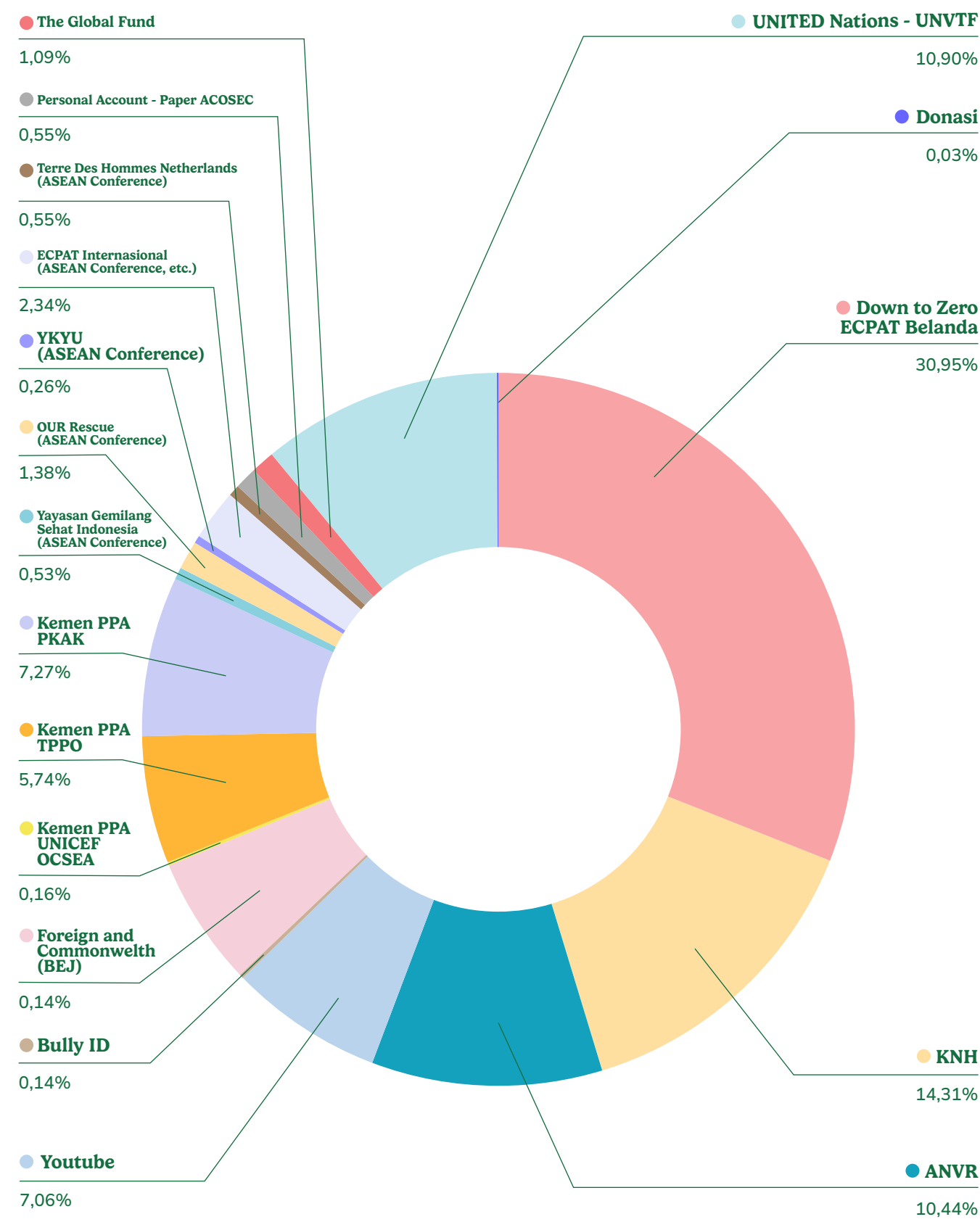
- Mendorong adanya layanan terpadu (one-stop services) yang profesional, mudah diakses, dan berorientasi pada pemberdayaan penyintas sesuai mandat Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- Mendorong implementasi layanan 24 jam yang inklusif bagi korban kekerasan dan eksploitasi seksual anak di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) sesuai dengan UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- Memastikan pendamping korban di UPTD PPA memiliki kapasitas untuk melakukan self-healing guna meningkatkan efektivitas dalam mendampingi penyintas.
- Meningkatkan keterlibatan anak, kaum muda, dan organisasi masyarakat sipil (NGO) dalam memperkuat UPTD PPA di 10 wilayah proyek.

Dengan program ini, ECPAT berkomitmen untuk terus berperan aktif dalam perlindungan anak dari eksploitasi seksual serta meningkatkan kesadaran dan kapasitas berbagai pemangku kepentingan dalam upaya pencegahan dan penanganannya.

ECPAT Members 2023-2024

Banda Aceh Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA) – Medan Center for Community Development & Education (CCDE)	Yogyakarta Yayasan Indriya-Nati (YIN)	Indramayu Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia (YKAI)	Batam Yayasan Mitra Kesehatan dan Kemanusiaan (YMKK)
Jakarta Yayasan Perkumpulan Bandungwangi (YPB)	Surakarta Yayasan KAKAK	Mataram Yayasan Tunas Alam Indonesia (SANTAI)	Batam Yayasan SETARA KITA
Jakarta Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia (YKAI)	Surabaya Arek Lintang (ALIT)	Pontianak Yayasan Sosial Solidaritas Nusantara (YSSN)	Bali Yayasan Lentera Anak Bali (LAB)
Jakarta Yayasan Kusuma Buana (YKB)	Semarang Yayasan SETARA	Pontianak Yayasan Asa Puan	
Jakarta Bangun Mitra Sejahtera Sejati	Bekasi Yayasan Dinamika Indonesia (YDI)	Lampung Lembaga Advokasi Anak (LADA)	
Yogyakarta Sekretariat Anak Merdeka Indonesia (SAMIN)	Bandung Bina Sejahtera Indonesia (BAHTERA)	Riau Yayasan Pendidikan Kesehatan Perempuan (KASEH PUAN)	

Sumber Pendanaan



Mitra ECPAT Indonesia

Mitra Pemerintah Indonesia



Jejaring ECPAT Indonesia di Indonesia



ECPAT Sebagai Mitra Kepercayaan Platform Digital



Membangun koordinasi dengan platform digital dan kepolisian untuk penanganan konten eksploitasi seksual

Jejaring ECPAT Indonesia di Global



Secretariat of ECPAT Indonesia

Jl. Angsana 1 RT 010 / RW 05 No. 16,
Pejaten Timur, Pasar Minggu,
Jakarta Selatan, 1250,
Indonesia



+6221-2503-4840 / +62811-9771-775



secretariat@ecpatindonesia.org



[@ECPAT_Indonesia](https://twitter.com/ECPAT_Indonesia)



[@ECPAT_Indonesia](https://www.instagram.com/ECPAT_Indonesia)



[ECPAT Indonesia](https://www.facebook.com/ECPAT_Indonesia)



[ECPAT Indonesia](https://www.youtube.com/ECPAT_Indonesia)

